

**Resonansi *Panem et Circenses*: Analisis Komparatif Politik
“Roti dan Sirkus” dalam Melanggengkan Oligarki di
Indonesia**



Disusun oleh:

Brian Christian Suroso (232202983)

Ni Ketut Widiani (232300107)

Nadine Angelica Subrata (232202903)

HIST1031 Iman Kristen dan Sejarah Dunia Barat

Calvin Institute of Technology

Semester Ganjil TA 2025/2026

ABSTRAK

Juvenal dalam karyanya “Satire X” memunculkan istilah *panem et circenses* (roti dan sirkus) yang menggambarkan kondisi Republik Romawi sejak abad ke-5 dan 6 SM sarat dengan ketimpangan antara dua kelas, *patrician* dan *plebeian*, usaha pemeliharaan *status quo* oleh *plebeian* dengan roti dan sirkus, yang naasnya berakhir pada kehancuran Republik Romawi melalui perang saudara. Kondisi-kondisi yang menjadi penyebab langgengnya politik roti dan sirkus dianalisis secara komparatif terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial Republik Indonesia masa kini. Penulis membahas beberapa dinamika masyarakat dengan pemerintah Indonesia yang bernuansa oligarkis dan feodal, dengan manuver-manuver “roti dan sirkus”, kaitannya dengan teori klientelisme dan *doxa* apatisisme politik. Penulis juga menuturkan beberapa hikmah dan prediksi yang bisa dipetik dari mempelajari sejarah politik Romawi untuk mitigasi kondisi politik Republik Indonesia di masa mendatang.

LATAR BELAKANG

Paradoks terbesar dari Republik Romawi Akhir adalah kesuksesan militernya yang justru menggerogoti kesejahteraan internal masyarakat. Bagaimana ekspansi Romawi berakhir kepada perang saudara bisa ditilik dari kondisi strata dan dinamika sosial masyarakat Romawi di masa itu (Plutarch, 75). Masyarakat Romawi secara garis besar terbagi menjadi dua kelas, yaitu *patrician* dan *plebeian*. *Patrician* merupakan sekelompok bangsawan yang mengakui diri sebagai keturunan dari keluarga pendiri Roma, tergolong ke dalam kelas elit yang memonopoli jabatan-jabatan tertinggi seperti konsul dan senat. Di sisi lain, *plebeian* merupakan rakyat biasa yang membentuk sebagian besar populasi Roma. Mereka hanya bisa bertani, berdagang, ataupun bekerja sebagai buruh untuk menafkahi hidup keseharian mereka. *Plebeian* juga memiliki kondisi ekonomi yang rapuh dan “dependen” dengan keputusan *patrician* (Plutarch, 75).

Sepanjang perang bertujuan untuk ekspansi besar-besaran, Republik Romawi mengeruk banyak sumber daya, termasuk tentara perang yang merupakan kaum *plebeian* (petani/buruh). Ternyata perang yang bertubi-tubi menghasilkan kemenangan demi kemenangan sehingga bukankah seharusnya para tentara kembali dengan senang dan menjadi rakyat yang berkecukupan? Ironinya, alih-alih memperoleh tanah dan kekayaan yang dijanjikan para elit, justru kehidupan ekonomi mereka semakin terhimpit (Appian, 1996).

Hal inilah yang diceritakan oleh Plutarch di dalam bukunya *Life of Tiberius Gracchus*. Ekspansi menghasilkan budak dan tanah jajahan (Plutarch, 75). *Patrician* mempekerjakan budak untuk memproduksi gandum yang melimpah untuk dijual ke tanah Romawi. Kenyataan pahit bagi para eks-tentara adalah harga gandum tanah jajahan jauh lebih murah dalam bentuk subsidi oleh pemerintah di program *Annona* (Hopkins, 1978), menyebabkan opsi mengusahakan ladang gandum mereka sendiri menjadi sebuah hal merugikan karena *supply and demand* yang tidak seimbang. Lantas mengapa mereka tidak menanam yang lain? Jawabannya adalah tidak bisa, mereka tidak memiliki modal untuk bisa menanam tanaman yang mewah tersebut. Tanaman mewah memerlukan modal bibit yang besar dan masa tanam yang lama.

Selama para petani meninggalkan ladang untuk berperang, ladang mereka menjadi terbengkalai (Appian, 1996). Appian di dalam bukunya *The Civil Wars* menceritakan bagaimana masyarakat Romawi, khususnya istri dan anak-anak dari tentara mengalami kemiskinan akibatnya. Bahkan Brunt di dalam bukunya *Social Conflict into Roman Republic* menunjukkan bagaimana demi bertahan hidup mereka memerlukan pinjaman dari kaum *patrician* (Brunt, 1974). Tanpa mereka sadari, seperti pepatah “*there’s no such thing as free lunch*”, Brunt menjelaskan bagaimana pinjaman tersebut dimaksudkan untuk merenggut tanah mereka. Setelah pulang perang dan tidak bisa mengusahakan ladangnya lagi, mereka pun terpaksa menjualnya dengan harga yang sangat murah karena tidak bisa membayar utang dan nasib mereka berujung sebagai pengangguran tunawisma yang mencari pekerjaan di kota Roma seperti tukang kebun, kurir, hingga petugas kebersihan. Sangat kontras dengan kehidupan *patrician* yang memperoleh banyak tanah kemudian menanaminya dengan tanaman seperti anggur atau zaitun yang mengakibatkan kesenjangan antara kaum *patrician* dan *plebeian* kian melebar (Cato, 1934).

Rakyat Romawi yang terpuruk dalam kemiskinan, melihat subsidi gandum dan pertunjukan hiburan dari *patrician* sebagai “pengharapan terakhir” mereka. Juvenal di dalam karyanya “Satire X” di sekitar tahun 100 M menggambarkan kejadian ini dalam bahasa yang puitis sebagai *bread and circus* (Juvenal, ca.200 A.D.). Frasa *bread and circus* juga muncul sebagai judul buku *Bread and Circuses* karya Patrick Brantlinger yang mengkritik budaya massa modern sebagai alat-alat hiburan masyarakat yang ironisnya menjadi semakin pasif dan kurang kritis terhadap isu sosial dan politik: bagaimana hiburan dari budaya populer tidak fokus kepada pemberdayaan manusia, tetapi hanya pemenuhan kebutuhan dasar dan hiburan spektakuler yang menenangkan rakyat secara superfisial selagi menggerogoti kondisi sosial, ekonomi, dan politik

(Brantlinger, 1983). Juvenal menggambarkan bagaimana masyarakat Romawi tidak menyadari suatu permasalahan yang fundamental.

Di era Republik Romawi ini, selain program *Annona* (“bread”), kaum *patrician* menyelenggarakan aktivitas publik seperti balapan kereta mewah hingga pertunjukan gladiator sebagai “*circus*” (Juvenal, 75). Melalui panggung-panggung ini, *patrician* memperoleh legitimasi dengan memamerkan kekayaannya. Kaum *plebeian* juga disuguhi hiburan yang mendistraksi mereka dari kesuraman kondisi sosial, ekonomi, dan politik Roma. Melalui ini dapat disimpulkan bahwa inti dasar dari konsep *bread and circus* adalah bagaimana ketentuan politik pengatur massa dititikberatkan kepada bagaimana massa tersebut dihibur dengan hal-hal menyenangkan yang dangkal, dengan konotasi negatif karena rakyat sebenarnya sedang dialihkan dari isu signifikan kepada kesenangan dan kekaguman terhadap pemerintah yang “manipulatif”. Mereka puas dengan roti dan hiburan yang menyenangkan, tanpa menyadari kebebasan mereka direnggut.

Bagaimana jika ternyata dinamika politik dan sosial Republik Indonesia membayang-bayangi paradigma politik Republik Romawi di saat ini? Makalah kali ini akan menganalisis konsep *bread and circus* lebih dalam dan menghubungkan pola pada permasalahan antara kedua republik di zaman yang berbeda ini.

PERMASALAHAN

- 1) Bagaimana konsep *bread and circus* dapat dimengerti esensinya untuk menganalisis paradigma politik?

Pola *bread and circus* yang ada di Romawi (Juvenal, 55) juga dapat ditemukan di Indonesia, terutama bagaimana beberapa elit yang menguasai “mesin negara” (Mills, 1959). Klientelisme, yaitu praktik menukarkan barang atau keuntungan dengan dukungan politik (Aspinall & Berenschot 2019), dapat dilihat pada masyarakat Indonesia yang menjual suaranya kepada berbagai hadiah “murah”, seperti beras, gula, minyak, dst. (Mutawalli et al., 2023). Kitschelt mendeskripsikan perilaku ini sebagai “*discount the future*” karena warga miskin dan berpendidikan rendah akan mementingkan pemenuhan akan kebutuhan dasar (keuntungan instan) (Kitschelt, 2000; Maslow, 1943). Konsep inilah yang nantinya akan dijabarkan terkait dengan *bread*. Namun, terdapat syarat tak tertulis untuk keberhasilan dalam sistem *bread*, yaitu hanya berlaku untuk orang yang miskin dan berpendidikan rendah yang akan dianalisis lebih lanjut (Aspinall & Berenschot 2019).

Circus juga terjadi melalui cara yang lebih halus. Media massa dan acara-acara televisi menggeser berita politik menjadi berita-berita “*infotainment*” atau “sensasionalisme” (Tapsel, 2017). Tapsel juga menjelaskan bahwa tidak jarang media digunakan untuk agenda politik tertentu. Selain itu, media massa kini digunakan untuk menghibur masyarakat dan acapkali mengubur realita politik menjadi sebagai liputan selebritas atau pertandingan olahraga alih-alih kebijakan dan fakta (Tapsel 2017). Hal inilah yang didefinisikan oleh penulis sebagai *soft circus*, sebuah distraksi yang terlihat positif dan menyenangkan, tetapi sebenarnya mengaburkan wawasan masyarakat mengenai kondisi politik negaranya sendiri.

- 2) Apa dasar pemerintah mengambil “strategi” *bread and circus*? Bagaimana budaya ini mempengaruhi pola kehidupan bernegara?

Alasan mendasar mengapa pemerintahan Romawi berstrategi seperti demikian bisa dikatakan untuk mempertahankan *status quo* mereka. Pola pemerintahan Indonesia yang cenderung feodal dan kapitalis juga sama-sama memanfaatkan dependensi kaum

yang tidak berdaya demi mempertahankan *status quo* dengan mengiming-imingi stabilitas (*bread*), feodalisme, merawat *doxa* apatisme politik, dan pengalihan isu demi mempertahankan legitimasi (*circus*).

Hal yang kemudian perlu diperhatikan adalah sifat dari *bread and circus* yang menghadirkan dependensi dari kaum *plebeian* untuk mempertahankan *status quo* dari kaum *patrician*. Kesamaan dari *bread and circus* tersebut akhirnya merawat feodalisme, merawat *doxa* apatisme politik, dan pengalihan isu demi mempertahankan legitimasi.

TINJAUAN PUSTAKA

1) Juvenal Satire X

Juvenal Satire X merupakan sebuah satir yang ditulis oleh Decimus Iunius Iuvenalis pada awal abad ke-2 AD/CE. Juvenal mengkritik sistem politik Romawi dan perilaku rakyat Romawi yang berubah setelah transisi Romawi dari republik menjadi kekaisaran. Ketamakan masyarakat Romawi pada saat itu telah membawa mereka ke dalam penderitaan dan juga kehancuran. Sebelum berubah menjadi kekaisaran, masyarakat Romawi memiliki andil dalam kekuasaan politik, baik kaum *plebeian* maupun *patrician*. Namun perubahan menjadi kekaisaran inilah yang membuat masyarakat Romawi kehilangan hak dan kuasa mereka atas urusan politik.

Perumpamaan mengenai *panem et circenses* (*bread and circus*) pertama kali dikemukakan oleh Juvenal di dalam Satire X. Perumpamaan ini menggambarkan masyarakat Romawi yang sebelumnya memiliki peran di dalam politik kini tidak memiliki keberdayaan di dalam struktur pemerintahan. Para pekerja seperti pedagang dan tukang buruh tidak mampu untuk menyampaikan aspirasi mereka lagi, sehingga mereka menggunakan cara demonstrasi untuk berkomunikasi dengan Kaisar. Disinilah *bread and circus* digunakan oleh kekaisaran untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari ketidakadilan dan hilangnya hak untuk bersuara dalam politik (Ellis 2019).

2) Meninjau *bread* sebagai klientelisme dan *circus* sebagai menjaga *doxa*, secara spesifik apatisme politik.

Konsep klientelisme ternyata bukanlah konsep baru yang diterapkan. Hal ini bisa dilihat bagaimana seorang antropologis, James C. Scott menjelaskan hal ini sebagai hubungan timbal balik yang tidak setara. Scott memulai dengan bagaimana seseorang akan mementingkan “*safety-first*” dimana lebih mementingkan hal kecil tapi pasti dibandingkan dengan hasil besar namun beresiko. Kemudian Scott menjelaskan bagaimana *patron* memberikan jaminan perlindungan saat krisis. Sebagai gantinya, klien memberikan loyalitas dan tenaga (Scott, 1976). Banyak riset terkait dengan klientelisme yang dihubungkan dengan bagaimana kondisi Indonesia, seperti *vote-buying*, *buzzer*, bahkan untuk menyebabkan populisme (Mutawalli et al., 2023; Muhtadi, 2019;

Sastramidjaja, 2022; Hadiz, 2017). Kitschelt menguatkan argumen dengan menyebutkan perilaku ini sebagai “*discount the future*” dan mekanismenya (Kitschelt, 2000).

3) Moncong Oligarki

F. Budi Hardiman di dalam karyanya Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia mengajukan tesis bahwa transisi demokrasi di Indonesia tidak berjalan dalam suatu konsolidasi, melainkan perangkap yang disebutnya sebagai “demokrasi yang berskandal” (Hardiman, 2013). Hardiman menerangkan bagaimana ide dari Kant mengenai *management of self interest* yang membuat negara setan egois masih bisa memiliki keadilan. Hardiman kemudian menjelaskan bahwa hukum yang dikendalikan oleh para oligarki itu tidak memiliki keadilan karena keadilan hanya bagi para kaum elit atau “*patrician*”.

Hardiman menyoroti paradoks di mana “kebebasan” demokrasi justru diwarnai dengan kebebasan bagi pemilik modal (*patrician*) untuk melakukan eksploitasi, sedangkan rakyat biasa berada dalam kondisi yang rentan dan dependen. Kondisi inilah yang menjadi ladang bagi praktik klientelisme sehingga rakyat menjadi “patuh”. Hal ini didukung dengan tesis dari Jeffrey A. Winters yang menyimpulkan Indonesia sebagai demokrasi kriminal dan dikuasai oleh oligarki liar (Winter, 2011).

Kondisi ini tentu menjadi cukup memprihatinkan ketika Edward Aspinall di dalam bukunya “Democracy for Sale”, menjelaskan bagaimana oligarki merusak birokrasi (Aspinall & Berenschot 2019). Aspinall menjabarkan bagaimana proyek adalah kehidupan politik Indonesia. Banyak kebijakan yang akhirnya didorong sehingga terdapat kantong-kantong yang diisi. Akibatnya, dana publik habis terserap dalam korupsi, menyisakan layanan yang buruk, seperti pendidikan yang rendah. Ironisnya, permasalahan ini dihubungkan dengan bantuan sosial sebagai *bread* dan dialihkan perhatiannya dengan drama *circus*.

4) Maslow Hierarchy of Needs; Theory of Human Motivation

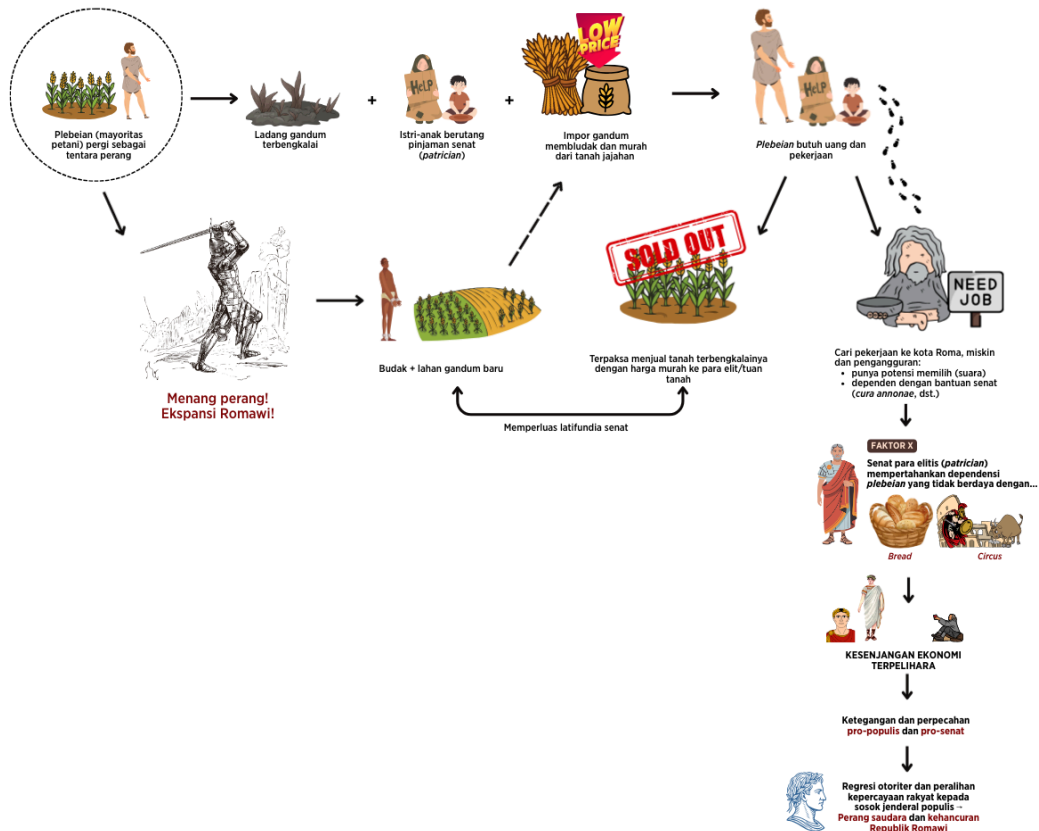
Hierarki kebutuhan Maslow adalah sebuah teori yang memaparkan *sequential satisfaction* manusia, yakni teori yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam sebuah hierarki berdasarkan kekuatan dominan. Teori ini ditelurkan oleh A. H. Maslow pada 1943 dengan judul “A Theory of Human Motivation.” Teori ini dimulai dari kebutuhan fisiologis (sebuah kondisi biologis manusia yang perlu mempertahankan

homeostasis) dan sebagai kebutuhan paling fundamental ini, apabila tidak terpenuhi, maka kebutuhan lain yang ada di atasnya akan pupus atau terkubur. Maka, perilaku pemilih yang pragmatis menerima “*bread*” (bansos) bisa dilihat sebagai respons alami organisme yang didominasi kebutuhan fisiologis. Maslow menegaskan bahwa bagi manusia yang lapar, kebebasan dan etika hanyalah “hiasan tak berguna”. Di saat kebutuhan fisiologis terpenuhilah kebutuhan yang lebih tinggi akan muncul, seperti rasa aman, stabilitas, perlindungan, dan ketertiban, dilanjutkan dengan kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki. Lalu, kebutuhan akan penghargaan seperti penilaian diri yang tinggi dan rasa hormat dari orang lain atau sekadar memperoleh sebuah apresiasi atau pencapaian prestasi dan kehormatan lain, semua berguna untuk menghasilkan rasa percaya diri dan perasaan berguna (Maslow, 1943).

Di Indonesia, di mana masyarakat berada di kondisi rentan secara ekonomi, mereka berada dalam kondisi darurat fisiologis yang menyebabkan “*bread*” atau bantuan-bantuan sosial, sembako, hingga serangan fajar adalah kebutuhan utama mereka alih-alih mementingkan idealisme demokrasi, visi-misi, dan lainnya yang lebih jangka panjang. Di saat yang sama, hiburan, citra pemimpin yang merakyat dan penuh hiburan menciptakan ilusi stabilitas dan kenyamanan psikologis yang memberi rasa aman semu daripada menuntut reformasi struktural yang berisiko. Keinginan untuk mengetahui dan memahami sulit muncul di kondisi ini karena berdasar argumen Maslow, keingintahuan untuk mencari fakta dan menganalisis realitas adalah kebutuhan kognitif yang jauh di atas kebutuhan fisiologis dan keamanan. Dengan demikian, strategi roti dan sirkus secara efektif menjadi blokade untuk masyarakat naik ke level kebutuhan kognitif ini dan tidak heran jika apatisisme politik juga terjadi.

ANALISIS

Makalah kali ini akan mencoba menganalisis kondisi politik roti dan sirkus di Republik Romawi yang memiliki manifestasinya di kondisi politik Indonesia sekarang. Di bawah ini adalah sebuah grafik yang memetakan gambaran besar politik roti dan sirkus di Republik Romawi dari penyebab hingga resolusinya.



Gambar 1. Analisis Manifestasi Politik Roti dan Sirkus pada Republik Romawi

Kondisi Kesenjangan Sosio-Ekonomi Indonesia yang *Viable* untuk Politik Roti (*Bread*)

Apabila kehidupan bangsa Romawi di saat itu terbagi menjadi kasta *patrician* dan *plebeian*, Indonesia bisa dikatakan terbagi menjadi kasta jelata dan segelintir kaum elit. Aspinall mengonfirmasi bahwa kemiskinan dan kesenjangan adalah faktor utama yang membuat masyarakat rentan terhadap klientelisme, khususnya apabila kontrol terhadap mayoritas dipegang oleh segelintir elit (Aspinall & Berenschot 2019). Walaupun sedikit dalam jumlah, kelompok elit yang berkuasa yang mempertahankan kekayaan dan kekuasaan/*wealth defense*, yang didefinisikan dalam pengertian oligarki yang merujuk kepada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (Winters 2011; Hardiman 2013) mampu memegang kontrol terhadap banyak orang yang tidak memiliki kekuatan, sebagaimana di masa itu, Romawi semakin luas dengan ekspansinya dan jajahan baru menjadi budak yang melayani permintaan *patrician* melalui segala kebijakannya. Rakyat dibentuk tidak memiliki kuasa untuk menghasilkan, dilihat dari batasan bertani dan kontrol harga yang merugikan, tetapi demi

mencegah kudeta kekuasaan, para senat menghibur mereka dan menciptakan citra melalui *bread and circus* (Brunt, 1974). Dalam kata lain, struktur ekonomi yang timpang melanggengkan politik *bread and circus*.

Masyarakat Indonesia mengalami kondisi “*modal-lacking*” dan kesulitan mencari pekerjaan (Projo & Pontoh, 2022). Bisa dilihat di banyak daerah di Indonesia, khususnya di luar Jawa yang ekonominya kurang beragam dan tidak mendapat eksposur perdagangan seaktif dan seluas kota-kota besar di pulau Jawa, rakyat tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah secara independen dari negara (Aspinall & Berenschot 2019). Masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan sebagaimana rakyat Romawi di masa itu, juga bisa dilihat dari bagaimana politisi bisa memeras pengusaha atau rakyat yang hendak membuka usaha dengan memberikan donasi kampanye atau suap demi memperoleh izin yang jelas menghambat rakyat biasa yang tidak punya koneksi politik dan akhirnya berujung menjadi pekerja dengan mata pencaharian yang *precarious* seperti buruh yang mudah digantikan (Projo & Pontoh, 2022).

Kondisi semakin empuk untuk politik roti dan sirkus seiring globalisasi meningkat pesat berkat berkembangnya internet dan media teknologi informasi. Hal ini meningkatkan konsumerisme dan juga kecenderungan masyarakat untuk menjadi konsumen barang impor yang membanjiri pasar dengan harga murah alih-alih menjadi produsen. Permasalahannya, afinitas terhadap impor menjadi hal yang juga disukai oleh pemerintah yang menjadikannya pintu korupsi. Di saat impor dipermudah dan semakin marak, ditandai dengan peningkatan jumlah impor Indonesia dari tahun ke tahun. Elit politik di Indonesia menjadikan lisensi impor sebagai sumber keuntungan ilegal yang cepat, termasuk untuk membiayai kampanye dan serangan fajar. Lalu, skandal impor daging sapi misalnya: salah satu partai politik di Indonesia menggunakan kendali atas Kementerian Pertanian untuk mengatur kuota impor demi mendapatkan dana ilegal (Aspinall & Berenschot 2019).

Masuknya barang impor membuat hasil petani lokal gagal dibeli dan menyebabkan posisi tawar petani lokal hancur. Misalnya, kasus masuknya bawang merah substandar India mendisrupsi bawang merah lokal yang selama ini menjadi komoditas unggulan bagi petani di Nganjuk yang kini harus bersaing dengan harga bawang bombay impor yang lebih murah sekaligus anjloknya harga jual bawang merah dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram menjadi hanya sekitar Rp15.000 hingga 20.000 per kilogram (Asih 2025). Kesulitan petani lokal yang bergantung terhadap harga pokok penjualan (HPP) yang tidak menentu atau tidak menutup

modal pengolahan lahan karena bergantung kepada tengkulak yang mendominasi rantai distribusi, juga implementasi dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk subsidi pupuk hingga asuransi gagal panen masih tidak menyelesaikan masalah (Maharini dkk. 2025, 1858; Jurnal Ekbis 2025). Petani tebu lokal juga mengalami anjlok harga jual gula tebu lokal karena gula rafinasi impor sebanyak 200 ribu ton merembes ke pasar konsumsi rumah tangga (Detik 2025). Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindrawardana, juga mengeluhkan bagaimana selama 3-4 tahun terakhir, sekitar 60 pabrik tekstil dan garmen lokal tumbang dan terjadi PHK massal karena liberalisasi impor pakaian jadi tanpa label, menunjukkan lemahnya pengawasan Kemendag dalam legalisir importasi borongan atau *mixed container* (Rizky 2025). Keras impor ini melumpuhkan produsen lokal dan menciptakan ketergantungan, menyebabkan rakyat lokal tidak punya ketahanan ekonomi dan selalu bergantung kepada pemerintah. Apabila rakyat berupaya menjadi produsen pun, bukan hanya gencatan persaingan barang impor, predator birokrasi juga seringkali memungut biaya informal (pungli) untuk layanan dasar atau perizinan yang memberatkan usaha kecil atas nama organisasi masyarakat yang membuat biaya keamanan fiktif, sewa lahan ilegal, uang sampah, hingga pungutan parkir yang tidak resmi (Mahendra dkk. 2025, 52; Andadari, Hunga, Ihalauw 1997, 42)

Mirip dengan kondisi Republik Roma pada saat tersebut, kondisi Indonesia yang sulit ini membuat rakyat rentan terhadap politik *bread* yang dalam bentuk konkretnya berupa uang atau sembako. Membiarkan ekonomi tetap timpang dan rakyat yang bergantung pada negara/elit, mempersulit akses ekonomi mandiri dengan perizinan yang korup hingga jual beli jabatan, menjadi salah satu kondisi *viable* untuk pemerintah mempertahankan *status quo* dan akhirnya meredam ketidakpuasan masyarakat dengan *bread* seperti bantuan sosial konsumtif dan serangan fajar seakan membeli loyalitas politik—bahkan politisi sering memberikan barang-barang seperti mie instan atau minyak goreng saat kampanye *door-to-door*. Kelompok miskin yang rentan ini memiliki tingkat diskon masa depan yang tinggi atau dalam kata lain, mereka lebih memilih keuntungan instan yang nyata seperti uang atau sembako saat pemilu daripada janji kebijakan jangka panjang yang belum tentu ditepati (Aspinall & Berenschot 2019). Dengan demikian, harga suara mereka menjadi murah dan strategi *bread* atau klientelisme menjadi sangat efektif.

Kondisi “Pengelabuan”: Rakyat *Gullible* yang *Viable* untuk Politik Sirkus (*Circus*)

Terdapat persamaan dari Indonesia dan Romawi dalam konteks *circus*. Terdapat rentetan kasus yang diungkap oleh berbagai media, seperti Majalah Tempo, di mana pejabat memiliki aset mewah yang dipamerkan di media sosial, sama halnya dengan gladiator ataupun lomba balap kereta pada zaman Romawi. *Flexing* tersebut bisa juga dalam bentuk yang lebih halus seperti, kendaraan pejabat yang menggunakan plat khusus ataupun kendaraan yang tergolong “mahal” bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Fenomena ini dijelaskan Mills sebagai “*borrowing prestige*”, status tidak lagi ditentukan oleh keturunan, melainkan publisitas (Mills, 1959). Hal ini ditujukan untuk adanya “stratifikasi” guna memperkuat ilusi “*magic helper*” demi mendapatkan dependensi masyarakat (Aspinall & Berenschot, 2019; Fromm, 1941).

Ide dari *circus* tersebut memiliki dampak yang sangat buruk di Indonesia. Edukasi rendah membuat masyarakat Indonesia menjadi mudah ditipu, salah satu bukti paling nyatanya adalah judi *online* atau *judol*. Drone Emprit menyatakan Indonesia adalah negara dengan pemain judi *online* terbanyak di dunia pada Maret 2024. Fenomena ini tidak terjadi secara ajaib, ketika seseorang terhimpit ekonomi, mereka akan fokus pada kebutuhan cepat atau keuntungan instan. Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menjelaskan bahwa banyak penjudi tidak segan melakukan pinjaman *online*. Mereka terpengaruh *influencer* yang “memamerkan” kekayaan membuat mereka merasa paham (*Dunning-Kruger Effect*) dan berujung kepada “*Digital Poverty Trap*” (Kruger & Dunning, 2000).

Salah satu dampak yang cukup fatal adalah Indonesia dapat dikatakan sebagai “sumber daya” yang mudah dikeruk oleh negara lain. Buktinya menurut BPS, nilai impor barang konsumsi Indonesia pada tahun 2024 mencapai US\$ 22,73 miliar (sekitar 350+ triliun) yang merupakan kenaikan 5,44% dari tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025). BPS menjelaskan kenaikan impor terutama terkait gadget & elektronik, gaya hidup (kendaraan), barang mewah, dan banyak lagi (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Di sisi lain, kekayaan Indonesia seperti nikel justru dikeruk dengan ekspor nikel mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2024, penjualan nikel mencapai 7,19 juta dollar, sedangkan nilai impor elektronik senilai 24,77 miliar yang artinya tidak cukup untuk menutup biaya belanja. Faktanya, 78% dari total volume nikel Indonesia diekspor kepada negara China dan pada saat yang sama, dibanjiri dengan produk elektronik dari China (Utama, 2025). Kondisi ini berlanjut hingga produk Indonesia kalah saing dengan produk mereka yang memiliki harga sangat murah.

Terbentuknya mentalitas masyarakat yang mudah dipercaya atau *gullible* bukanlah tanpa alasan, melainkan hasil konsekuensi dari suatu sistem yang dirancang dengan baik. Perhatikan bahwa dari sisi pemerintah, banyak dari mereka melakukan *flexing* seperti *patrician* yang mempertontonkan kekayaan mereka di dalam gladiator ataupun lomba balap kereta mewah. Dengan demikian, sistem stratifikasi atau pemisah sosial menjadi lebih jelas. Belum lagi *patrician* pada zaman ini melebar hingga perseorangan yang memiliki kuasa untuk kepentingan mereka, seperti *influencer* dan secara khusus terkait Kripto. Perhatikan juga pada sisi masyarakatnya, masyarakat Romawi pada zaman tersebut mengalami kesulitan sehingga memerlukan pinjaman dari *patrician*. Bukankah pada zaman ini, banyak orang melakukan pinjaman *online* demi kepentingan tertentu? Perampasan “kesempatan” juga nampak dalam masyarakat Romawi yang mendapatkan impor gandum secara masif membuat mereka tidak dapat bersaing.

Dibalik sebab dan akibat ini, terdapat penjelasan yang sangat kuat mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Di tengah gempuran *flexing*, bukan tidak masuk akal seseorang akan merasa minder, bahkan inferioritas (Festinger, 1954). Ditambah lagi menurut teori Shafir, mereka yang merasa miskin akan melemahkan kemampuan kognitif (Shafir et al., 2013). Shafir melanjutkan dengan akibatnya dimana mereka akan masuk ke dalam “terowongan/*tunneling*” yang artinya mereka hanya melihat masalah yang ada di depan mereka. Dalam kata lain, otak mereka masuk ke dalam “mode bertahan” dan di tengah-tengah skema “cepat kaya” yang mengglobal akan membuat mereka terpancing. Dalam kondisi lemah ini, seseorang akan cenderung untuk bergabung dengan kerumunan (konformitas massa) demi mendapatkan apa yang Le Bon jelaskan sebagai “kekuatan tak terkalahkan” karena faktor jumlah (Bon, 1895). Mekanisme inilah yang pelan-pelan mengikis masyarakat yang mampu merefleksikan keputusan politiknya menjadi kerumunan yang pasif.

Terlahirnya *Doxa* Apatisme Politik

Masyarakat di Indonesia memiliki salah satu karakteristik menonjol, yaitu memiliki *doxa apatisme politik*—yang ditandai dengan ketidakpedulian terhadap politik dan dianggap sudah wajar (Deer 2008). Masyarakat cenderung memandang bahwa politik selalu penuh dengan korupsi, ketidakadilan, tindak kecurangan, dan tidak ada transparansi sehingga sulit bagi masyarakat untuk ikut terlibat (University of Oxford 2021). Masyarakat Indonesia saat ini merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki ruang untuk menyalurkan aspirasi dan berkontribusi bagi sistem politik. Sikap apatis politik ini sudah menjadi bagian dari habitus berpolitik oleh masyarakat sehari-harinya.

Banyak masyarakat tetap percaya bahwa politik akan selalu berada di kondisi yang sama walaupun orang yang menjabat sebelumnya sudah diganti dengan yang baru (Abraham & Viatrice, 2013). Masyarakat percaya sistem politik tidak akan pernah berubah menjadi sistem yang transparan dan bebas korupsi. Kepercayaan inilah yang akhirnya memperkuat *doxa* yang sudah ada pada masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, masyarakat jatuh ke dalam kondisi psikologis yang dikenal dengan politik *learned helplessness* (Aspinall & Berenschot 2019). Ini juga merupakan bentuk dari *symbolic violence*, yaitu suatu bentuk kekerasan non-fisik yang diterapkan oleh kelas dominan secara tidak disadari dan diterima oleh kelas terdominasi sebagai *doxa* (Schubert 2012). Kondisi psikologis ini membuat masyarakat memiliki pemikiran bahwa usaha mereka pasti akan sia-sia sehingga lebih baik untuk tidak terlibat dalam urusan politik (Sager 2019). *Doxa* ini terus bertahan di antara masyarakat Indonesia yang tersebar melalui konten media sosial, percakapan antar kerabat, hingga pengalaman secara langsung yang membentuk sifat apatis masyarakat sekarang (Agus & Ansori, 2019).

Fenomena ini memiliki pola yang sama dengan analogi *Five Monkey Experiment*, dimana terdapat sekelompok monyet yang sedang mempelajari kebiasaan tertentu bukan karena memahami tujuannya, tetapi karena takut mendapatkan hukuman sosial dari kawanannya (Intersol Group 2020). Pola ini juga terlihat di antara masyarakat Indonesia. Seringkali, orang yang berusaha untuk menjadi tokoh yang ideal di dalam urusan politik pasti akan mengalami suatu dilema bahwa pada dasarnya politik selalu dijalankan dengan cara yang sama, tidak akan pernah berubah. Tekanan sosial ini membuat orang-orang yang ingin menegakkan keadilan dengan cara benar mengurungkan niatnya dan akhirnya mengikuti mayoritas.

Doxa apatisme juga turut diperparah oleh gaya hidup generasi anak muda, yang menjalani kehidupannya di dalam era digital (penuh dengan media sosial). Gagasan Jonathan Haidt mengenai *The Anxious Generation* mendukung hal ini. Anak muda yang tumbuh di era ini mengalami lonjakan kecemasan, depresi, dan penurunan ketahanan mental akibat perubahan pola hidup yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan biologis manusia. Kehidupan mereka hanya berpusat pada internet dan media sosial, yang membuat mereka menjadi lebih cemas, cenderung menghindari risiko terkena isolasi dari masyarakat. Mereka percaya bahwa opini yang berbeda dari masyarakat merupakan bentuk kekerasan. Generasi muda hidup di dalam pemikiran *safety-ism*, karena pada akhirnya rasa keamanan sosial lebih penting daripada melakukan hal yang benar (Haidt 2024, 99). Mereka pada akhirnya takut untuk bertindak dan membuat kesalahan, inilah yang disebut *cancel culture* (Adeyemi 2025, 1). *Cancel culture* yang dialami oleh orang Indonesia juga memiliki pola yang sama sehingga rakyat lebih cenderung mengikuti opini mayoritas agar tidak diserang oleh mayoritas. Contohnya ketika terjadi demo, orang yang tidak mendukung atau tidak mengunggah konten yang berkaitan dengan pendukung akan dianggap sebagai orang yang “*tone deaf*”. Anggapan mengenai “*tone deaf*” merupakan suatu fenomena *Spiral of Silence*, teori yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann seorang ilmuwan politis Jerman. Teori ini mengemukakan suatu fenomena sosial mengenai orang-orang yang berusaha mengikuti suara mayoritas walaupun mereka sendiri tidak paham atau bahkan tidak setuju akan hal tersebut. Hal ini dilakukan oleh masyarakat agar mereka tidak terisolasi dari suatu komunitas (Matthes dan Arendt 2016, 1).

Semakin kesini, ruang politik berubah menjadi ruang untuk menunjukkan kepedulian berpolitik melalui media sosial (ruang publik) (Anggara & Pratama, 2019). Banyak orang yang beranggapan bahwa kepedulian harus ditunjukkan dengan bentuk dukungan seperti membagikan konten viral, mengikuti opini tertentu, dan mengikuti tren sosial tertentu. Namun, semua tindakan ini hanyalah bagian dari *circus* yang secara terus-menerus menyediakan hiburan, peralihan isu, dan drama yang bisa mengalihkan perhatian masyarakat dari problem internal politik yang sebenarnya. Sikap apatisme tidak harus ditunjukkan secara pasif, tetapi juga bisa ditunjukkan dari keaktifan masyarakat. Masyarakat awam cenderung bereaksi terhadap konten viral tanpa memahami akar permasalahan yang sebenarnya terjadi (Anggara & Pratama, 2019).

Budaya feodal yang secara teori adalah sistem tanah dan hierarki di Eropa abad pertengahan, juga menanam akarnya di Indonesia yang punya sejarah panjang sistem kerajaan di

mana raja yang “maha benar”, kolonialisme yang melestarikan feodalisme untuk mengontrol rakyat, dan kentalnya ketimpangan di mana budaya penguasa (elit) dianggap sakral atau lebih tinggi dan rakyat biasa harus tunduk; *doxa* apatisme ini untuk terus berlangsung (Haryanto 2014, xvi; Fauzan & Adela 2020). Norma sosial seperti rasa sungkan pada akhirnya membuat masyarakat takut untuk memberi kritik, masukan, maupun memberi pertanyaan; di saat politik dinasti seperti penempatan keluarga dalam struktur politik dan oligarki lokal oleh kepala daerah tetap berjaya (Fauzan & Adela 2020). Kombinasi antara kecemasan dengan aspek feodalisme akan menciptakan masyarakat yang pasif dan mudah digiring oleh mayoritas atau yang berkuasa.

Paradox Kemiskinan di Tengah Kekayaan

Imbas dari politik roti dan sirkus adalah kondisi berkebalikan yang semakin ekstrem: yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Semakin luasnya Romawi setelah berhasil ekspansi tidak menjadikan rakyatnya semakin kaya. Indonesia dengan kekayaan tambang, keragaman sumber daya, juga musim yang sangat mendukung untuk kekayaan agrikultur, mengapa tidak berhasil menyejahterakan rakyatnya? Mengapa akhirnya Indonesia cenderung tidak dapat mengolah sumber daya yang ada? Hal ini ada kaitannya dengan budaya feodalisme yang kental di Indonesia yang mencerminkan budaya roti dan sirkus.

Kemajuan dalam pengelolaan sumber daya tidak lepas dari kemajuan pendidikan. Melalui edukasi dan juga pendidikan formal dan keterampilan, rakyat dicerdaskan dan dipersiapkan dengan kemampuan berinovasi, mengolah kekayaan alam, dan manajemen risiko yang baik untuk dapat berdikari. Namun, kenyataan pahit berada di depan mata selama bertahun-tahun, bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tidak pernah memuaskan. Hal ini bisa ditilik secara kualitatif maupun kuantitatif, terutama bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia cukup memprihatinkan, menilik dari nilai PISA tahun 2022.

Indonesia sendiri memiliki indikasi untuk “memelihara” kondisi edukasi rendah dari paradoks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pendidikan. APBN untuk pendidikan mungkin terkesan besar (20%), tetapi hal tersebut ditetapkan berdasarkan pajak yang mudah dihindari dengan kurangnya dokumen (Aspinall & Berenschot 2019). Cara mengukur yang lebih jelas adalah dengan melihat kepada persentase PDB (produk domestik bruto). Menurut World Bank, Indonesia merupakan salah satu negara terendah dalam pendanaan di bidang pendidikan dengan angka 1,3% PDB. Padahal UNESCO menetapkan standar untuk pendidikan pada 4-6% PDB (UNESCO 2016). Uang 20% APBN ini pun habis untuk "belanja pegawai" (gaji rutin) dan "birokrasi", bukan untuk riset atau peningkatan kualitas murid: uang habis, tapi kualitas (PISA) turun (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022).

Secara kualitatif, kualitas kurikulum Indonesia cukup diragukan efektivitasnya. Pergantian-pergantian kurikulum di Indonesia patut dicurigai sebagai salah satu bukti Indonesia sebagai “Negara Proyek” (Aspinall & Berenschot 2019). Aspinall menegaskan bahwa perubahan kurikulum untuk permintaan masif terutama dalam pengadaan barang dan jasa seperti pencetakan jutaan buku baru, proyek guru, dan seterusnya yang berakhir dengan permainan “spek”. Hal ini dibuktikan bahwa PISA Indonesia yang diterbitkan OECD (Organisation for

Economic Co-operation and Development) mengalami penurunan. Penulis mengidentifikasi keadaan ini dengan *hard circus* sebagai “kondisi pembodohan” pada masyarakat, erat dengan indikasi berusaha menyingkirkan pemberontakan masyarakat dan mempertahankan *status quo*.

Fokus pemerintah dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia juga cukup menimbulkan pertanyaan. Keputusan belum lama yang diambil soal penghapusan program beasiswa IISMA (Indonesian International Student Mobility Awards), pengurangan kuota pendanaan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa), hingga isu-isu mengenai gaji guru yang terlampau rendah, perlu dikritisi lebih lanjut (Widjaja & Kasih, 2025; Putra, 2025). Salah satu patokan menilai bagaimana negara mendukung kemajuan edukasi melalui pendanaan riset dan pemerintah yang menopang perkembangan inovasi rakyat lokal, masih perlu dikembangkan lagi.

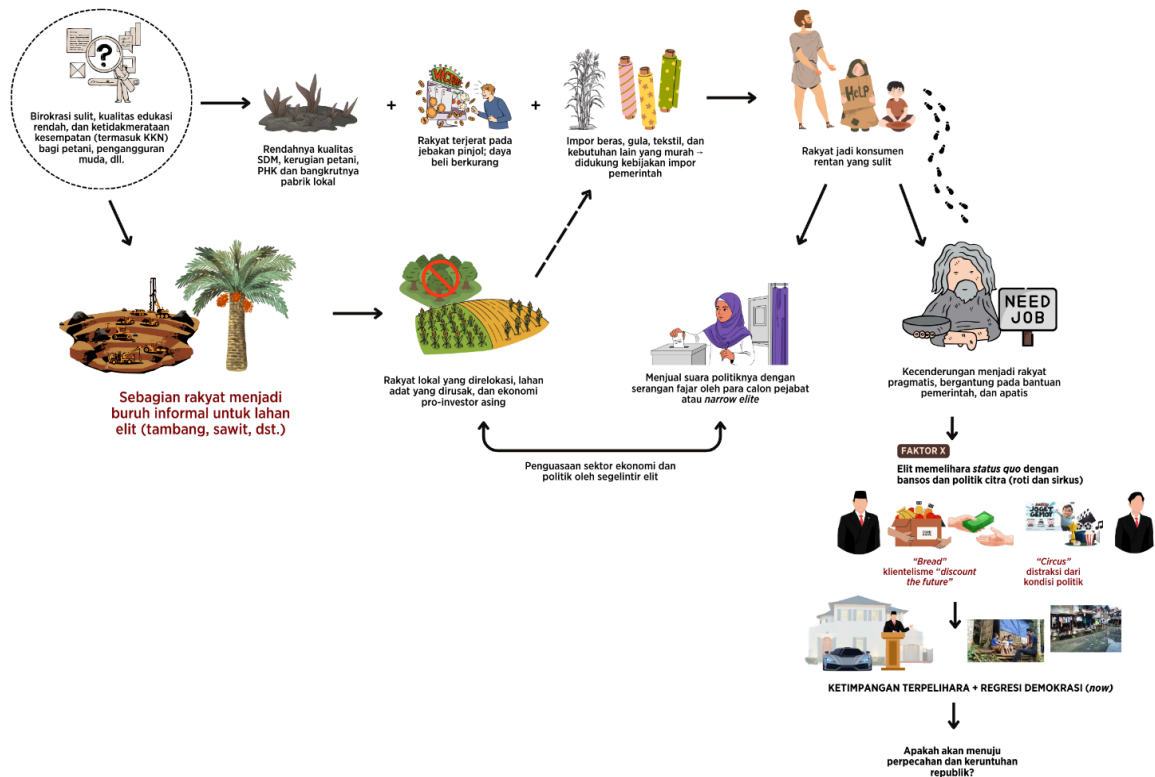
Akar permasalahan bisa ditarik ke bagaimana Indonesia masih menghidupi kebudayaan feodal yang kental. Bisa terlihat bagaimana siswa-siswa sekolah cenderung menghindari bertanya di kelas karena menilai bertanya sebagai tindakan yang salah terhadap guru (sosok yang lebih superior) atau memalukan karena terlihat bodoh (Kaslum et al., 2022). Desain penghargaan terhadap pekerjaan di Indonesia juga dititikberatkan pada pekerjaan yang lebih stabil dan bergengsi, dengan memuliakan pangkat, gelar, dan semacamnya. Konservatif dan cenderung mencari kestabilan, selain berakar dari budaya feodalisme, juga beriringan disebabkan dan menyebabkan rakyat cenderung memikirkan masalah perut, sesuai dengan hierarki kebutuhan (motivasi).

HIKMAH DAN PREDIKSI

Pola pemerintahan di Indonesia dengan dinamika klientelisme dan *doxa* apatisme politik dapat dibagi menjadi dua skenario: Skenario Distopia (jika *status quo* dari pemerintah berlanjut dengan *bread and circus*) dan Skenario Utopia. Reformasi akan menjadi hal yang sulit, tetapi jika tidak diusahakan, berdasarkan pola republik Romawi di masa itu dapat ditarik beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi di Indonesia.

Sejarah Romawi mengajarkan bahwa sebuah imperium tidak runtuh dalam semalam, melainkan sudah membusuk lebih dulu dari dalam karena ketimpangan dan hilangnya moralitas publik. Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan yang serupa. Persimpangan tersebut bahkan sudah hadir di depan mata, menilik peristiwa Peringatan Darurat (Garuda Biru). Puspitasari menunjukkan bagaimana rakyat merasa DPR tidak lagi mewakili suara mereka, bahkan mereka menjadi peralatan untuk menjalankan oligarki (Puspitasari, 2024). Ketimpangan yang menjadi akibatnya, bila dipertahankan melalui tindakan-tindakan eksklusif dan penyelesaian masalah yang hanya menyentuh permukaan atau dilakukan “sekadarnya”, lama-kelamaan tentu akan menciptakan kebencian hierarkis seperti rakyat Romawi yang akhirnya muak pada senat dan mendukung jenderal-jenderal populis seperti Julius Caesar atau Marc Antony. Rakyat Indonesia yang kecewa pada demokrasi yang korup bisa saja terbuai oleh sosok “Ratu Adil” atau pemimpin otoriter yang menjanjikan solusi instan ketika “senat” (wakil rakyat) sudah tidak memiliki legitimasi dan tidak memenuhi janji-janji pengabdian mereka kepada masyarakat: perhatikan bagaimana proses tersebut tidak terjadi dalam semalam dimana rakyat sudah kecewa kepada kaum “elitis”, dibuktikan dari bagaimana ketika hak rakyat yang mengikuti perang tidak diberikan (tanah dan uang), polarisasi antara pro-senat dan pro-populis semakin nyata. Perang saudara yang terjadi sebagai risiko dari regresi otoriter: sosok kepemimpinan yang kuat dengan janji merombak kondisi korup dan politik uang (Aspinall & Berenschot 2019).

Faktor X dari pola politik *bread and circus* di Masa Romawi ini dimulai dari segelintir elit yang mau mempertahankan kuasa (*status quo*) dan melalui ekspansi-ekspansi, mereka melihat kesempatan demi kesempatan untuk menambah kekayaan tanpa memperkuat fondasi yang adalah rakyat itu sendiri. Rakyat yang berperang justru kehilangan aset, dan Romawi semakin kurus dari dalam. Rakyat yang tidak punya pilihan lain selain bergantung pada senat, justru dependensi pihak tak berdaya inilah yang dimanfaatkan untuk pemuasan golongan elit.



Gambar 2. Analisis Manifestasi Politik Roti dan Sirkus di Indonesia yang Menyerupai Republik Romawi

Skenario utopia juga dapat diusahakan, tetapi lebih menuntut komitmen bersama baik pemerintah dan juga rakyat. Di dalam prosesnya, memerlukan lebih banyak waktu dan juga perubahan yang fundamental dari sekedar memuaskan rasa “lapar” semata. Reformasi struktural untuk intervensi dari nasib Romawi yang terulang bisa dilakukan di tiga sektor utama: birokrasi, hukum, dan pendidikan.

Birokrasi yang saat ini bekerja layaknya waralaba di mana jabatan diperjualbelikan, hubungan atasan-bawahan seperti raja dan pelayan masih menjadi sarang perolehan kekuasaan yang tidak sehat dan menelurkan banyak predator-predator jabatan (Fauzan dan Adela 2019). Meritokrasi total dengan menghapus senioritas buta, budaya *sycophants*, dan koneksi orang dalam sekaligus basis *key performance indicator* yang transparan, bisa menumbuhkan kembali integritas dalam kekuasaan. Digitalisasi seluruh prosedur pemerintahan yang memangkas pintu korupsi dengan *one gate system* juga dapat mengurangi campur tangan manusia dalam birokrasi seperti pungli dan semacamnya. Indonesia perlu membuat kondisi invers dari sekarang, seperti

distribusi yang merata dan menghubungkan kesempatan: sumber daya Indonesia dengan mereka yang bisa mengolah, supaya memiliki daya cipta.

SIMPULAN

Hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah adalah ciri utama masyarakat feodal. Tanpa kepastian hukum, meritokrasi yang disebutkan di atas mustahil terjadi. Hukum bukan dibuat untuk proteksi kekayaan oligarki. Tanpa kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang disebabkan kondisi hukum yang bisa dibeli oleh mereka yang memiliki uang, maka moralitas publik akan turun dan persatuan dari dalam semakin retak.

Romawi yang di saat itu tidak fokus menjadi produsen, melainkan menjadi konsumen gandum impor murah tidak mengajarkan rakyatnya berkembang dan semakin *modal-lacking*. Golongan elit dalam Republik Romawi yang mempertahankan kekuasaannya dengan politik roti dan sirkus, akhirnya runtuh karena perpecahan. Indonesia, dilihat dari klientelisme yang masih kental ditambah dengan bagaimana pemerintah berusaha menggeser perhatian rakyat kepada hal menyenangkan yang memberi keamanan dan kestabilan semu, membuat komparasi keduanya cukup kompatibel dan bisa menjadi pelajaran untuk rakyat Indonesia sebelum potensi pola yang berulang ini terjadi.

Kembali lagi, semua dimulai dari pendidikan yang berkualitas. Pendidikan harus menghapus budaya “sungkan bertanya” sebagai pemberantasan mental feodal sejak dini. Kemampuan bertanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang menjadi modal baik untuk “vaksin” terhadap hoaks dan sirkus politik yang berusaha mengelabui mereka dari kenyataan politik yang tidak adil, sesuai dengan bagaimana sirkus efektif terhadap masyarakat yang “bodoh”. Indonesia perlu memberi modal riset dan anggaran pendidikan yang tepat guna, seperti pendanaan riset dan gaji guru yang layak alih-alih cetak buku ganti kurikulum dan kegiatan proyek-proyek lainnya. Meritokrasi juga lebih mungkin dijalankan ketika pola pikir masyarakat tidak lagi terobsesi dengan gelar, tetapi lingkungan yang menghargai keterampilan dan inovasi nyata yang bermanfaat konkret.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, J., & Diantini Ida Viatrie. (2013). *Apakah Kreativitas dan Sikap terhadap Ilmu Ekonomi Meramalkan Partisipasi Politik Mahasiswa? Peran Mediasi Efikasi Politik pada Mahasiswa di Malang, Jawa Timur*. Makara Hubs-Asia, 17(2), 109–125. <https://doi.org/10.7454/mssh.v17i2.2960>.
- Adeyemi, V. (2025). *The Psychological Impact of Cancel Culture: Anxiety, Social Isolation, and Self-Censorship*. PREMIER JOURNAL of PSYCHOLOGY. <https://doi.org/10.70389/PJP.100005>.
- Anggara, S., & Pratama, H. S. (2019). *MASYARAKAT JEJARING, MEDIA SOSIAL, DAN TRANSFORMASI RUANG PUBLIK: REFLEKSI TERHADAP FENOMENA ARAB SPRING DAN “TEMAN AHOK.”* Paradigma: Jurnal Kajian Budaya, 9(3), 287-310. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v9i3.241>.
- Agus, & Z. Ansori. (2019). *Sosiologi Politik: Filosofi, Kajian, Teori, dan Pemikiran Islam*. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, 1-229. https://repository.uinmataram.ac.id/2734/1/Sospol%20Islam_Agus.pdf.
- Appian. (1913). *The Histories of Appian*. Loeb Classical Library. <https://bit.ly/AppianBC1>.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale*. Cornell University Press. <https://dokumen.pub/qdownload/democracy-for-sale-elections-clientelism-and-the-state-in-indonesia-9781501732997.html>.
- Ayunda Pininta Kasih. (2025, 29 April). *Soal Kelanjutan Kampus Merdeka, MSIB hingga IISMA, Kemendikti: Berjalan, tapi....* Kompas. https://www.kompas.com/edu/read/2025/04/29/190924471/soal-kelanjutan-kampus-merdeka-msib-hingga-iisma-kemendikti-berjalan-tapi#google_vignette.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Ekspor November 2024 mencapai US\$24,01 miliar. Impor November 2024 senilai US\$19,59 miliar*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/16/2345/ekspor-november-2024-mencapai-us-24-01-miliar-impor-november-2024-senilai-us-19-59-miliar-.html>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). *Impor Barang Konsumsi, 1989-2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MCMx/impor-barang-konsumsi--1989-2024.html>.

- Bon, G. L. (1895). *The Crowd: A Study of the Popular Mind*. International Relations and Security Network, 1-94. https://www.files.ethz.ch/isn/125518/1414_LeBon.pdf.
- Brantlinger, P. (2016). *Bread and Circuses*. Cornell University Press, 1-307. <https://d119vjm4apzmdm.cloudfront.net/open-access/pdfs/9781501707643.pdf>.
- Brunt, P. A. (1972). *Social conflicts in the Roman Republic* (M. I. Finley, Ed.). W. W. Norton & Company, 1-164. <https://oceanofpdf.com/authors/p-a-brunt/pdf-social-conflicts-in-the-roman-republic-download/>.
- Deer, C. (2008). *Doxa* (M. Grenfell, Ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/upo9781844654031.011>.
- Detik. (2025, August 20). *Merugi Imbas Banjir Impor, Petani Tebu Ngadu ke DPR*. Deutsche Welle. <https://www.dw.com/id/merugi-imb-banjir-imp-or-petani-tebu-ngadu-ke-dpr/a-73703233>.
- Eka Yudha Saputra, & Wibowo, E. A. (2023, 23 Agustus). *Drone Emprit Temukan Hampir 4 Juta Situs Judi Online Gunakan Domain Pemerintah*. Tempo Inti Media. <https://www.tempo.co/hukum/drone-emprit-temukan-hampir-4-juta-situs-judi-online-gunakan-domain-pemerintah--152748>.
- Elder, C. the . (1934). *De Agri Cultura*. Loeb Classical Library. <https://bit.ly/CatoAgrA>.
- Ellis, L. (2019, 23 Agustus). *A Brief Look at the Juvenal's "Bread & Circuses."* Medium. <https://medium.com/@lindaellisphd/a-brief-look-at-the-juvenals-bread-circuses-a5ffe5770dba>.
- Fauzan, I., & Adela, F. P. (2019). *Feudalism in Indonesia Democracy*. Proceedings of the 3rd International Conference on Social and Political Development, 1, 33–38. <https://doi.org/10.5220/0010002100330038>.
- Festinger, L. (1954). *A theory of social comparison processes*. Human Relations, 7(2), 117–140. <https://doi.org/10.1177/001872675400700202>.
- Hadiz, V. (2017). *On Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Ibrahim UP CIDS DISCUSSION PAPER SERIES 18-001. <https://cids.up.edu.ph/wp-content/uploads/2022/02/UP-CIDS-Discussion-Paper-Series-18-001-1.pdf>.

- Haidt, J. (2024). *The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness* (pp. 1–478). Penguin Press.
- Hardiman, F. B. (2013). *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia*. Kanisius.
- Hopkins, K. (1978). *Conquerors and Slaves (Sociological Studies in Roman History)* (Vol. 1). Cambridge University Press.
https://fliphtml5.com/yvcfb/layc/Keith_Hopkins_-_Conquerors_and_Slaves_%28Sociological_Studies_in_Roman_History%2C_Vol._1%29_%281978%29/1/.
- Intersol Group. (2020, 26 Mei). *Organizational Culture and the 5 Monkeys Experiment*. Intersol.
<https://intersol.ca/news/organizational-culture-and-the-5-monkeys-experiment/>.
- Jurnal Ekbis. (2025, 16 September). *Petani Tembakau Lombok Timur Menuntut Kehadiran Pemerintah*.
<https://jurnalekbis.com/2025/09/16/petani-tembakau-lombok-timur-menuntut-kehadiran-pemerintah-harga-anjlok-modal-membengkak/#user-content-fn-4>.
- Juvenal. (1467). *Satires*.
https://www.loebclassics.com/view/juvenal-satires/2004/pb_LCL091.373.xml?readMode=reader.
- Kalsum, U., Chastanti, I., & Harahap, D. A. (2021). *Analisis Keterampilan Bertanya Siswa pada Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar*. Jurnal Basicedu, 6(1), 433–441.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.1921>.
- Kitschelt, H. (2000). *LINKAGES BETWEEN CITIZENS AND POLITICIANS IN DEMOCRATIC POLITIES*. Sage Publications, 845-879.
<https://la.utexas.edu/users/chenry/core/Course%20Materials/Kitschelt/CFB47C5882ABD9F5108854435730C7EF39626DE168.pdf>.
- Kruger, J., & Dunning, D. (2000, Januari). *Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments*. Journal of Personality and Social Psychology, 1, 30-46.
https://www.researchgate.net/publication/12688660_Unskilled_and_Unaware_of_It_How_Difficulties_in_Recognizing_One.
- Maharani, S. A., Nabila, A., Aliudin, Rohmah, N. A., & Aspawi, G. A. F. S. (2025). *Strategi Bertahan Petani Cabai Terhadap Fluktuasi Harga Serta Dampaknya Pada Keberlanjutan*

- Usahatani: Studi Kasus Di Baros, Serang*. Nusantara Journal of Multidisciplinary Science, 2(11), 1857–1863. <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms>.
- Mahendra, G. A., Faseh, L. N., Robbani, M. A., & Mashudi. (2025). *Dampak Pungutan Liar Oleh Organisasi Masyarakat Bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)*. Jurnal Multidisiplin Ibrahimy, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.35316/jummy.v3i1.7291>.
- Maslow, A. H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. Psychological Review, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>.
- Matthes, J., & Arendt, F. (2016). *Spiral of Silence*. The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, 1–8. <https://doi.org/10.1002/9781118766804.wbiect147>.
- Mills, C. W. (1956). *The Power Elite*. Oxford University Press, 1–432. <https://edarcipelago.com/boxpdf/C.%20Wright%20Mills-The%20Power%20Elite.pdf>.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3>.
- Mullainathan, S., & Shafir, E. (2018). *Scarcity: Why Having Too Little Means So Much*. Times Books. <https://dokumen.pub/qdownload/scarcity-why-having-too-little-means-so-much-842013nbpped-0805092641-9780805092646.html>.
- OECD. (2023, 5 Desember). *PISA 2022 Results (Volume I and II) - Country Notes: Indonesia*. OECD Publishing, 1–10. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_e6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html.
- OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education* (pp. 1–489). OECD Publishing, 1–225. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>.
- Plutarch. (1921). *The Parallel Lives* (Vol. X). Loeb Classical Library. <https://bit.ly/LivesTGracchus>.
- Puspitasari, M. (2024). *View of Transformasi aktivisme digital menuju aktivisme riil: Kajian atas garuda biru dan unjuk rasa 22 Agustus 2024*. Journal of National Paradigm-Based Resilience Strategy, 1(2), 95–108. <https://doi.org/10.61511/napbres.v1i2.2024.1096>.
- Retno Ayuningrum. (2025, 10 Agustus). *Penjelasan PPATK soal Dompot Digital Dipakai buat Depo Judol Capai Rp 1,6 T*. Detikjogja.

<https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-8054352/penjelasan-ppatk-soal-dompet-digital-dipakai-buat-depo-judol-capai-rp-1-6-t>.

Rizky, M. (2025, 29 Oktober). *60 Pabrik Garmen Tumbang Dihantam Pakaian Impor Tanpa Label Asal China*. CNBC Indonesia.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20251029124951-4-680296/60-pabrik-garmen-tumbang-dihantam-pakaian-impor-tanpa-label-asal-china>.

Sastramidjaja, Y. (2022). *CYBER TROOPS, ONLINE MANIPULATION OF PUBLIC OPINION AND CO-OPTATION OF INDONESIA'S CYBERSPHERE*.

https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/03/TRS7_22.pdf.

Schubert, J. D. (2012). *Suffering/symbolic violence* (M. Grenfell, Ed.). Cambridge University Press.

<https://www.cambridge.org/core/books/abs/pierre-bourdieu/sufferingsymbolic-violence/E7A23471D9136B86482CC9807362CF3E>.

Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence In Southeast Asia* (pp. 1–246). Yale University Press.

<https://s3.us-west-1.wasabisys.com/p-library/books/f25ec87f75a3ff23ed995be5015d1406.pdf>.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025). *Inilah Aturan Baru Menteri Keuangan Tentang Mobil Dinas Operasional Pejabat Di Dalam Negeri*.

<https://setkab.go.id/inilah-aturan-baru-menteri-keuangan-tentang-mobil-dinas-operasional-pejabat-di-dalam-negeri/>.

Swasty, R. (2025, 5 Desember). *Menkeu Purbaya: Kurang Pantas Guru Dapat Gaji Rendah*. Medcom.

<https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/nbw5GYBK-menkeu-purbaya-kurang-pantas-guru-dapat-gaji-rendah>.

Tapsell, R. (2017). *Media Power in Indonesia*. Media, Culture and Communication in Asia-Pacific Societies.

<https://dokumen.pub/media-power-in-indonesia-oligarchs-citizens-and-the-digital-revolution-9781786600356-1786600358.html>.

- Thamrin, J., Bambang, D., & Sundayana, Y. (1997). *Masalah Pungutan Yang Dihadapi Pengusaha Kecil : Mampukah Mereka Mengembangkan Daya Saing?* <https://media.neliti.com/media/publications/564-ID-pungutan-dan-usaha-kecil.pdf>.
- UNESCO. (2016). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all*. 1-84. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656>.
- University of Oxford. (2021, 13 Januari). *Social media manipulation by political actors an industrial scale problem*. <https://www.ox.ac.uk/news/2021-01-13-social-media-manipulation-political-actors-industrial-scale-problem-oxford-report>.
- Utama, V. R. (2025). *The Global South in a Multipolar World Order: The Impact of the Indonesi-China Strategic Partnership*. *Journal of Global Strategic Studies*, 05(01), 87–121. <https://doi.org/10.36859/jgss.v5i1.3480>.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarki*. Gramedia Pustaka Utama, 1-478. <https://sudimara-tabanan.desa.id/desa/upload/media/upload%20buku%2009092022/Oligarki.pdf>.
- World Bank. (2025). *Government Expenditure on education, Total (% of GDP) | Data*. <https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS>.